Level	Uraian
TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Nilai Reformasi Birokrasi

SASARAN (POKIN LEVEL 2)	INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja; Nilai LPPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
Menurunnya potensi penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai MalAdministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Reformasi Hukum
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan

PROGRAM (SIPD)	SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatnya kesesuaian LKjIP dengan Permenpan 53 tahun 2014	persentase OPD yang menyusun LKjIP dengan Permenpan 53 tahun 2014
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Anjab, ABK, dan Peta Jabatan yang valid dan mutakhir
	Meningkatnya kualitas evaluasi jabatan ASN	Persentase jabatan ASN yang dievaluasi sesuai standar (anjab abk)
	Meningkatnya kualitas standar pelayanan publik sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014	Persentase unit layanan yang memenuhi komponen standar pelayanan sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014
	Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan layanan publik.	Persentase standar pelayanan yang dipublikasi pada SIPPN
	Meningkatnya pengawasan dan perbaikan atas penyelenggaraan layanan publik.	Persentase unit layanan dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik minimal 4
	meningkatnya ketepatan waktu layanan	persentase UP dengan nilai unsur ketepatan waktu layanan minimal 3.5
	Meningkatnya transparansi informasi persyaratan penyelenggaraan layanan publik.	Persentase persyaratan layanan yang dipublikasikan
2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya efektifitas penggunaan sumber daya (APBD)	persentase perangkat daerah dengan Capaian kinerja APBD minimal 80%
	meningkatnya kualtas perencanaan pengadaan barang/jasa	persentase Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan dalam SIRUP
	Meningkatnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.	persentase PPK yang memiliki sertifikat minimal tipe c
3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	meningkatnya kesesuaian LPPD dengan pedoman penyusunan LPPD	persentase data dukung IKK yang sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD
	terlaksananya Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi	jumlah perda dan perbup yang dilakukan harmonisasi
	terlaksananya keberlanjutan kebijakan	persentase perda yang ditindaklanjuti dengan perbup
	Meningkatnya transparansi informasi kebijakan	persentase kebijakan yang di publikasi melalui JDIH Gresik

KEGIATAN (SIPD)	SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)
1.1. PENATAAN ORGANISASI	Tersusunnya Laporan kinerja OPD tepat waktu	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
	Meningkatnya kompetensi SDM Perangkat Daerah dalam Pelaporan	Persentase peserta pelatihan penyusunan pelaporan kinerja yang hasil pre test dan post testnya mengalami peningkatan
	Pendampingan Penyusunan Anjab dan verifikasi perrhitungan beban kerja	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan Anjab
	verifikasi perrhitungan beban kerja	Jumlah OPD yang diverifikasip erhitungan beban kerja
	terlaksananya reviu standar pelayanan	Persentase UP yang melakukan reviu SP
	melaksanakan update standar pelayanan pada SIPPN	jumlah UP yang melakukan Update standar pelayanan pada SIPPN
	terlaksananya evaluasi data dukung PEKPPP	persentase UP yang dievaluasi data dukungnya
	meningkatnya kualitas SOP	Jumlah SOP yang di evaluasi
1.2. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA	Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan Adm Barang sesuai ketentuan yang berlaku
1.3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang dilaksanakan
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara
1.9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional yang dilaksanakan
1.10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Mewujudkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kerumahtanggan yang difasilitasi
1.11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi
2.1. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kesesuaian penyerapan APBD dengan Time schedule / Rencana anggaran kas (RAK)	Persentase Perangkat daerah dengan penyerapan APBD sesuai RAK
2.2. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tersedianya dokumen rencana umum pengadaan perangkat daerah yang telah diverifikasi.	Jumlah dokumen RUP yang telah diverifikasi.
2.3. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan
2.4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan bidang SDA yang ditetapkan
3.1. ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	meningkatnya kualitas data dukung IKK	persentasi data dukung IKK yang terverifikasi
3.2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama daerah yang tersedia
3.3. FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	terlaksananya public hearing	jumlah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat
	terlaksananya evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence based)	jumlah kebijakan yang di evaluasi
	terlaksananya dokumentasi produk hukum,	persentase produk hukum yang di dokumentasikan
3.4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terverifikasinya Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa	Persentase Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa yang Terverifikasi

SUB KEGIATAN (SIPD)	SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD)	INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD)
1.1.1. PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1.1.2. PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1.1.3. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis …
1.1.4. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis …
1.1.5. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan …
1.1.6. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan …
1.1.7. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan …
1.1.8. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan …
1.2.1. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah …
1.3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1.3.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi …
1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut …
1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti …
1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan …
1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor …
1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1.5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang …
1.5.6. Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan …
1.5.9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan …
1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas …
1.6.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan …
1.6.3. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
1.6.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.6.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan …
1.6.6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau …
1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber …
1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan …
1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum …
1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau …	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas …
1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas …	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan …
1.8.3. Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/…
1.8.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan …
1.8.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau …
1.9.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah …
1.9.2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional …
1.10.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah …
1.10.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil …
1.10.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah …
1.11.1. Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
1.11.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1.11.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2.1.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi …
2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program …
2.1.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan …
2.2.1. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan …
2.2.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara …
2.2.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi …
2.3.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, …
2.3.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi …
2.3.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan …
2.4.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan …
2.4.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan …
2.4.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan …
3.1.1. PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi …
3.1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi …
3.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi …
3.2.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam …
3.2.2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
3.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3.3.1. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
3.3.2. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
3.3.3. PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum …
3.3.4. Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
3.4.1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental …
3.4.2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, …	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian …
3.4.3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, …	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja …